

**PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR DARAT OLEH PT. ENERGI
CAHAYA MAKMUR DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN
KARIMUN**

**Oleh
Dewi Utami
NIM. 180563201082
Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pertambangan pasir darat yang ada di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Dikarenakan banyak bekas galian pasir darat yang ada di kecamatan Kundur Barat yang tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah, padahal bekas galian pasir darat tersebut berada di wilayah pemukiman dan perkebunan masyarakat. Di masa sekarang untuk pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh PT. Energi Cahaya Makmur juga belum jelas apakah pembaruan izin produksi bisa diterbitkan oleh pemerintah pusat atau tidak, sehingga pihak pemerintah desa bisa mengambil langkah apa yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di samping itu juga untuk mengetahui kendala Dinas ESDM dan Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan pertambangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengawasan secara preventif dan represif yang di cetuskan oleh Sujamto. Adapun teknik pengumpulan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas ESDM, Inspektur Tambang, Direktur dari PT. Energi Cahaya Makmur, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Pekerja PT. Energi Cahaya Makmur. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan dalam pengawasan represif juga ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses produksi dan membuat masyarakat mengeluhkan kepada pemerintah melalui media. Sedangkan untuk pengawasan preventif sendiri dari pihak pemerintah belum bisa melakukan tindakan apapun karena belum ada informasi yang jelas dari pemerintah pusat terkait izin penambangan akan diperbaharui atau tidak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pertambangan pasir darat belum maksimal dikarenakan lamanya proses tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait kelanjutan dari proses pertambangan apakah masih boleh beroperasi atau tidak.

Kata Kunci : Pengawasan, Pertambangan, Pasir Darat

***SUPERVISION OF INLAND SAND MINING BY PT. CAHAYA MAKMUR
ENERGY IN KUNDUR BARAT DISTRICT, KARIMUN DISTRICT***

by
Dewi Utami
NIM. 180563201082

Abstract

This study aims to determine the supervision carried out by the government regarding land sand mining in Kundur Barat District, Karimun Regency. This is because there are many ex-land sand excavations in Kundur Barat sub-district that have not received any follow-up from the local government, even though the former land sand excavations are in residential areas and community plantations. At the present time for onshore sand mining carried out by PT. Energi Cahaya Makmur is also not clear whether renewal of production permits can be issued by the central government or not, so that the village government can take what steps to take in accordance with the applicable laws. In addition, it is also to find out the constraints of the Department of Energy and Mineral Resources and the Mining Inspector in carrying out mining supervision. The theory used in this research is preventive and repressive supervision initiated by Sujamto. The collection techniques with interviews, documentation, and observation. The data obtained was then analyzed by means of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants in this study were the Department of Energy and Mineral Resources, Mining Inspector, Director of PT. Cahaya Makmur Energy, Village Government, Communities, and Employees of PT. Prosperous Light Energy. From the research conducted, it was shown that under repressive supervision there were also problems that occurred during the production process and made the public complain to the government through the media. Meanwhile, for preventive supervision, the government itself has not been able to take any action because there is no clear information from the central government whether mining permits will be renewed or not. The conclusion of this study is that the supervision carried out by the local government regarding land sand mining has not been maximized due to the lengthy follow-up process from the central government regarding the continuation of the mining process whether it is still allowed to operate or not.

Keywords : Surveillance, Mining, Onshore Sand